

Repertoar Perlawanan Laskar Hijau Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

Indra Sanjaya

Abstract

Pertambangan selalu digambarkan dengan upaya menghadirkan kesejahteraan. Pasca peristiwa pembunuhan dan penganiayaan petani sekaligus aktivis anti-tambang Salim Kancil dan Tosan, aktivitas pertambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang seketika menjadi sorotan publik. Lokus dalam penelitian ini adalah gerakan yang dilakukan oleh Laskar Hijau. Sekelompok masyarakat yang diorganisasikan untuk melakukan gerakan sosial sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang semakin kritis. Penelitian ini memfokuskan pada gerakan perlawanan Laskar Hijau terhadap pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Teori Gerakan Sosial dan Teori Repertoar untuk mengidentifikasi Laskar Hijau sebagai Gerakan Sosial dan bentuk-bentuk perlawanan yang dipilih oleh Laskar Hijau.

Dari serangkaian wawancara, dokumentasi dan analisis maka ditemukan kesimpulan bahwa Laskar Hijau merupakan Gerakan Sosial dengan beberapa indikator, yakni: tantangan bersama; tujuan bersama; identitas dan solidaritas kolektif; serta mempertahankan politik perlawanan. Kemudian, bentuk-bentuk perlawanan Laskar Hijau dan Masyarakat Wotgalih mengalami beberapa perubahan bentuk perlawanan. Charles Tilly, yang mempelopori konsep repertoar perlawanan, menegaskan bahwa tanggapan rival perlawanan terhadap inisiatif dari para penentang harus dimasukkan dalam komponen integral dalam repertoar perlawanan. Bentuk perlawanan Laskar Hijau mengalami perubahan bentuk dalam kurun waktu tertentu. Kondisi-kondisi yang menyebabkan Laskar Hijau melakukan perubahan bentuk perlawanan karena tanggapan dari pihak lawan dan menganggap bahwa bentuk perlawanan tersebut belum efektif untuk pencapaian tujuan bersama.

Kata Kunci: Laskar Hijau, Repertoar Perlawanan, Gerakan Sosial, Pertambangan

Pendahuluan

Pertambangan selalu digambarkan dengan upaya menghadirkan kesejahteraan. Ketika investasi pertambangan masuk dalam suatu daerah, dipercaya dapat membawa kesejahteraan berupa: sumbangan pendapatan yang besar bagi pemerintah daerah; dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar daerah pertambangan. Namun, dalam beberapa kasus pertambangan pun selalu dibarengi dengan penolakan dari masyarakat yang daerahnya akan dijadikan sebagai lokasi pertambangan, seperti pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo, pertambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang dan pertambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang.

Pasca peristiwa pembunuhan dan penganiayaan petani sekaligus aktivis anti-tambang Salim Kancil dan Tosan, aktivitas pertambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang seketika menjadi sorotan publik. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan telah banyak terjadi di Indonesia. Jutaan hektar hutan digunduli, gunung-gunung dikeruk, sungai-sungai yang tercemar merupakan salah satu akibat dari adanya pertambangan. Publik telah

mengenal luas bagaimana kasus Lumpur Lapindo telah menghabisi kehidupan dan penghidupan warga Sidoarjo di puluhan desa hingga saat ini. Juga pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya, menjadi bukti begitu berbahayanya dampak pertambangan¹.

Kasus pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang, desa Selok Awar-Awar yang ditentang oleh beberapa kelompok petani termasuk Salim Kancil dan Tosan sejalan dengan alur argumen tersebut diatas. Dampak dari pertambangan pasir tersebut adalah kerusakan lingkungan berupa rusaknya pesisir pantai Watu Pecak. Kerusakan tersebut tergambar dari banyaknya kolam-kolam raksasa akibat pertambangan pasir secara berlebihan dikawasan tersebut. Pasir terus dikeruk selama dua tahun lebih hingga meninggalkan lubang seluas lapangan sepak bola sedalam empat meter². Selain itu, sawah warga setempat juga mengalami kerusakan. Dampak dari pertambangan pasir mengakibatkan irigasi pesawahan dan pertanian menjadi rusak sehingga lahan pertanian warga menjadi tandus dan tidak dapat ditanami padi kembali.

Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa dimana Salim Kancil terlibat didalamnya, merupakan suatu aksi kolektif atau gerakan sosial yang dilatarbelakangi oleh penderitaan deprivasi akibat dampak dari aktivitas pertambangan liar di Desa Selok Awar-Awar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Salim Kancil menolak aktivitas pertambangan liar di desanya dengan mendirikan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa. Forum ini melakukan Gerakan Advokasi Protes tentang Pertambangan Pasir yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di desa mereka dengan cara bersurat kepada Pemerintah Desa Selok Awar-Awar, Pemerintah Kecamatan Pasirian bahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang³. Pada 9 September, forum melakukan aksi damai penyetopan aktivitas pertambangan pasir dan penyetopan truk muatan pasir di Balai Desa Selok Awar-Awar yang menghasilkan surat pernyataan kepada Kepala Desa Selok Awar-Awar untuk menghentikan aktivitas pertambangan pasir⁴. Sehari sebelum Salim dibunuh, 25 September, forum merencanakan aksi penolakan tambang pasir pada Sabtu, 26 September⁵.

Lokus dalam penelitian ini adalah gerakan yang dilakukan oleh Laskar Hijau. Sekelompok masyarakat yang diorganisasikan untuk melakukan gerakan sosial sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang semakin kritis⁶. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Klakah (tempat terbentuknya Laskar Hijau) adalah kerusakan hutan di Gunung Lemongan yang mengakibatkan masyarakat sulit memenuhi kebutuhan air bersih⁷.

¹ Dwicipta & Hendra Try Ardianto, *#Rembang Melawan: Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng*, Yogyakarta: Literasi Press, 2005, hlm 39-40

² Heny Rahayu, "Pesisir Lumajang Rusak Akibat Tambang Liar" diakses dari <http://www.benarnews.org/indonesian/berita/tambang-pasir-11052015122300.html> pada tanggal 23/12/2015 pukul 19:23 WIB

³ Harry Purwanto, Sepak Terjang Perjuangan Salim Kancil Melawan Penambang Liar, <http://www.rappler.com/indonesia/107755-sepak-terjang-salim-kancil-dibunuh-lumajang>, pada tanggal 24/12/2015 pukul 18:40

⁴ *Ibid.* diakses pada tanggal 24/12/2015 pukul 18:40

⁵ *Ibid.* diakses pada tanggal 24/12/2015 pukul 18:40

⁶ Siti Huzaimah, "Gerakan Laskar Hijau dalam Upaya Pelestarian Hutan Gunung Lemongan Klakah Lumajang", *Skripsi UNEJ*, Jember: Universitas Jember, hlm 52

⁷ *Ibid.* hal 50

Laskar Hijau adalah gerakan penghijauan yang dilakukan oleh masyarakat Klakah untuk melestarikan kembali hutan Gunung Lemongan yang telah rusak. Sebelum terbentuk Laskar Hijau, mulanya kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh masyarakat Klakah tertuang dalam kegiatan Maulid Hijau. Maulid Hijau adalah kegiatan yang digagas dan diselenggarakan oleh masyarakat Klakah/masyarakat sekitar Ranu Klakah sebagai acara perayaan Maulid Nabi yang diikuti dengan kegiatan penghijauan.⁸

Melihat kondisi Ranu Klakah sudah mulai banyak ditumbuhi pepohonan, masyarakat Klakah mulai belajar untuk membangun organisasi dan manajemen pengelolaan sebuah kegiatan melalui praktek langsung. Mereka terus melakukan penghijauan beralih ke kawasan hutan Gunung Lemongan yang telah gundul. Karena penghijauan di Gunung Lemongan tidak hanya membutuhkan waktu insidentil seperti di Ranu Klakah ini yang penghijauannya hanya bulan maulid, hari lingkungan dan hari bumi. Tapi ketika Gunung Lemongan dengan luas hutan lindung sekitar 2000 hektar lebih itu maka harus intens, karena itu harus dibentuk tim yaitu Laskar Hijau. Pada tanggal 28 Desember 2008 tepatnya terbentuk sebuah komunitas peduli lingkungan yang menamakan dirinya sebagai Laskar Hijau.⁹

Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan ruang kepada PT Antam (Aneka Tambang) dengan mengeluarkan ijin pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih PT Antam sendiri sebelumnya pernah melakukan kegiatan pertambangan di Desa Wotgalih, namun kegiatan tersebut tidak berlangsung lama, hanya 3 tahun (1998-2001). Kegiatan tersebut berhenti di tengah jalan karena dianggap kurang menguntungkan secara ekonomis. Pada tahun 2009 ketika harga jual pasir besi melambung tinggi di pasar internasional, PT ANTAM mengajukan permohonan ijin pertambangan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang. Permohonan ijin tersebut digunakan sebagai perpanjangan kontrak usaha yang sebelumnya pernah dilakukan.¹⁰

Ijin perpanjangan kontrak yang akan dilakukan oleh PT Antam dalam kegiatan pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih ditolak oleh masyarakat. Penolakan dilakukan dengan mendatangi Kantor Pemkab Lumajang, Kantor Balai Desa Wotgalih, dan Kantor Pengadilan Negeri Lumajang. Alasannya Desa Wotgalih merupakan kawasan hutan lindung yang tidak dapat dialihfungsikan sebagai tameng tsunami. Selain itu, masyarakat juga khawatir jika pertambangan terus dilakukan akan terjadi kerusakan lingkungan dan pencemaran dari limbah yang ditimbulkan¹¹.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini akan berfokus pada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Laskar Hijau sebagai organisasi peduli lingkungan terhadap aktivitas pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang. Dengan memahami pola-pola gerakan sosial yang dilakukan oleh Laskar Hijau dalam merespon aktivitas pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang. Inilah yang akan menjadi indikator dari bentuk perlawanan Laskar Hijau terhadap Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Rumusan Masalah

Apa saja bentuk perlawanan Laskar Hijau terhadap pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang?

⁸ *Ibid.*, hal 44

⁹ *Ibid.*, hal 48

¹⁰ *Ibid.*, diakses pada 14/02/2016 Pukul 15:02 WIB

¹¹ *Ibid.*, diakses pada 14/02/2016 Pukul 15:02 WIB

Kerangka Teori

Teori Gerakan Sosial

Terdapat beberapa pendekatan untuk memahami teori-teori gerakan sosial. Hasanudin¹² menjelaskan beberapa pendekatan teoritis yang berbeda dalam gerakan sosial dapat didefinisikan sesuai dengan penekanan pada salah satu diantara empat faktor ini: ketidakpuasan, sumber daya, peluang politis, atau proses-proses konstruksi pemaknaan. Selain itu gerakan sosial telah dikonspetualisasikan sebagai epifenomena dari *societal breakdown* (perpecahan masyarakat), sebagai kegiatan politik dengan cara lain, atau sebagai kolektivitas di dalam pencarian identitas (baru)¹³. Penekanan pada faktor ketidakpuasan bersesuaian dengan teori perpecahan (*breakdown theories*); sumber daya dan peluang cocok dengan pandangan tentang gerakan sebagai tindakan politik dengan cara lain; dan konstruksi makna dan pembentukan identitas adalah konsep yang serumpun¹⁴.

Giddens mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective actions*) diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan¹⁵. Sedangkan Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang¹⁶.

Faktor penyebab terjadinya gerakan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Giddens, Kornblum, berikut Light, Keller dan Calhoun menekankan pada penderitaan devripasi (kehilangan, kekurangan dan penderitaan), misalnya dibidang ekonomi (hilangnya peluang untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan)¹⁷. Menurut James Davies dengan konsep devripasi relative-nya mengemukakan bahwa meskipun tingkat kepuasan masyarakat meningkat terus, namun mungkin saja terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan keadaan nyata yang dihadapi¹⁸. Kesenjangan antara pemenuhan kebutuhan yang diinginkan masyarakat dengan apa yang diperoleh secara nyata, inilah yang dinamakan devripasi relatif¹⁹.

Dalam perkembangannya, tidak semua aksi-aski kolektif dapat dikatakan sebagai gerakan sosial. Bagi Tarrow, konsep gerakan sosial harus memiliki empat properti dasar²⁰.

¹² Hasanudin. *Dinamika dan Pengerucutan Teori Gerakan Sosial*. Hal 62

¹³ *Ibid*, hlm 62

¹⁴ *Ibid*, hlm 62

¹⁵ Suharko, Gerakan Sosial Baru di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.10, No.1*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006, hlm 3

¹⁶ *Ibid*, hlm 3

¹⁷ Rizal A. Hidayat, "Gerakan Sosial sebagai Agen Perubahan Sosial", *Jurnal Forum Ilmiah Indonusa, Vol.4, No.1*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, hlm 15

¹⁸ *Ibid*, hlm 15

¹⁹ *Ibid*, hlm 15

²⁰ Suharko, Gerakan Sosial Baru di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vo.10, No.1*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006, hlm 5-7

a. Tantangan kolektif (*collective challenge*)

Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi, atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Dalam system represif, tantangan kolektif disimbolisasikan lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru objek-objek familiar dengan symbol yang berbeda atau baru.

Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumberdaya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap negara). Dalam menghampiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, penentangan (*contention*) mungkin hanya satu-satunya sumberdaya gerakan yang bisa dikuasai. Karena itu, gerakan mempergunakan tantangan kolektif untuk menjadi focal point (titik fokus) bagi para pendukung, memperoleh perhatian dari kubu yang dilawan dan pihak ketiga, dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

b. Tujuan bersama

Ada banyak alasan bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun, jikalau ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas, atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dari kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

c. Solidaritas dan identitas kolektif

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama (*common denominator*) dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara menggerakkan konsesus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsesus semacam itu. Namun, para pemimpin hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas, atau keyakinan agama.

d. Memelihara politik perlawanan

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individu, atau berubah menjadi sekte religious, atau mungkin menarik diri ke dalam isolasi. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran dimana suatu penentangan (*contention*) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

Dengan demikian, gerakan sosial perlu dibedakan dengan aksi-aksi kolektif. Setidaknya gerakan sosial memiliki empat properti dasar yang ditawarkan Tarrow diatas. Selain itu, pembeda anantara gerakan sosial dan aksi kolektif lainnya yaitu, gerakan sosial merupakan gerakan terorganisir yang mempunyai misi khusus dalam setiap aksinya dan memiliki strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Gerakan sosial juga dilakukan dengan penuh pertimbangan dalam pembentukannya dan orang-orang yang terlibat didalamnya. Terakhir, gerakan sosial cenderung bertahan lama dan bisa berlangsung sampai kurun waktu bertahun-tahun²¹.

Dalam proses kemunculannya, gerakan sosial mengalami beberapa tahapan. Proses tahapan sebuah gerakan sosial, adalah meliputi²²: *pertama*, tahap ketidaktentraman (keresahan), ketidakpastian dan ketidakpuasan yang semakin meningkat; *kedua*, tahap perangsangan, yakni ketika perasaan ketidakpuasan sudah semaiakin memuncak. Penyebabnya sudah diidentifikasi dan ada ajakan serta petunjuk-petunjuk dari kalangan tokoh sebagai pembangkit semangat emosi masa; *ketiga*, tahap formalisasi, yakni ketika para pemimpin telah muncul, rencana telah disusun, para pendukung telah ditempa dan taktik telah dimatangkan; *keempat*, tahap institusionalisasi, yakni ketika organisasi diambil alih dari pemimpin terdahulu, birokrasi telah diperkuat, dan ideology serta rencana telah diwujudkan. Tahap ini seringkali merupakan akhir dari kegiatan gerakan sosial; *kelima*, tahap pembubaran (disolusi), yakni ketika gerakan itu berubah menjadi organisasi atau justru mengalami pembubaran.

Teori Repertoar

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Tilly. Kata repertoar memiliki arti berbagai pilihan aksi yang sudah disiapkan sebelumnya. Konsep ini menjelaskan bagaimana setiap pergerakan memiliki set aksi yang dapat dilakukan. Tilly menggunakan frasa “repertoar aksi” untuk merujuk bentuk spesifik, metode dan cara ekspresi perilaku dari aksi kolektif²³. Kata repertoar merujuk kepada serangkaian rutinitas terbatas yang dipelajari, dibagi dan diejawantahkan melalui proses pilihan yang membebaskan²⁴. Repertoar adalah sebuah penciptaan budaya melalui proses pembelajaran. Mereka bukanlah sekumpulan kata filosofi yang abstrak atau berasal dari propaganda politik. Repertoar muncul dari perjuangan²⁵. Tilly lebih lanjut menjelaskan bahwa repertoar adalah sekumpulan alat yang dapat dipergunakan oleh sekelompok masyarakat dalam mencapai keinginan mereka²⁶. Tilly menekankan bahwa repertoar didedikasi sebagai alat interaksi diantara sekelompok masyarakat dalam jumlah besar bukan diantara individu²⁷.

Charles Tilly menegaskan bahwa tanggapan rezim terhadap inisiatif dari para penentang harus dimasukan dalam komponen integral dari repertoar perlawanan pada kurun waktu tertentu. Ini untuk dua alasan. Pertama, tindakan yang dibuat oleh penguasa sering memprovokasi perlawanan masa terhadap tatanan yang mapan, sehingga umumnya menyesatkan untuk mengasumsikan bahwa para pemrotelah yang melakukan tindakan

²¹ I Putu Dedy Wiguna, dkk, “Implikasi Gerakan People’s Alliance For Democracy”, Bali: Universitas Udayana, hlm 3

²² Syamsu A. Kamaruddin. Pemeberontakan Petani Unra 1943, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol.16, No.1*, Makasar: Universitas Veteran Republik Indonesia, 2012, hlm 22

²³ Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: Resist Book, 2010, hlm 138

²⁴ Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 47

²⁵ *Ibid*, hlm 47

²⁶ *Ibid*, hlm 47

²⁷ *Ibid*, hlm 47

terlebih dulu. Kedua, “repertoar tindakan kolektif melihat bukan pada kinerja individu, tetapi pada cara interaksi di kalangan pasangan atau serangkaian lebih besar para aktor. Pertemanan, bukan individu, yang menjalankan repertoar”.²⁸

Kajian repertoar perlawanan selama ini berhadapan dengan pertanyaan mengapa repertoar berubah dengan menunjuk faktor-faktor jangka panjang yang menentukan ongkos dan keuntungan dari tindakan kolektif bagi mereka yang menentang *status quo*. Tilly mengatakan bahwa repertoar perlawanan berubah secara dramatis antara 1750 hingga 1840 karena munculnya hal-hal seperti ekspansi manufaktur padat modal, konsolidasi dalam aparat pemerintah pusat dan laju urbanisasi yang meningkat.²⁹

Arthur Stinchcombe mengungkapkan bahwa dalam pandangan Tilly “repertoar dari bentuk-bentuk tindakan kolektif yang efektif berubah secara evolusioner bersamaan dengan perubahan besar dalam struktur sosial.”³⁰ White senada dalam menjelaskan adanya perubahan signifikan dalam repertoar protes rakyat pada zaman *modern* Jepang akibat perubahan organisasi ekonomi nasional dan provinsi, gelombang kemakmuran dan krisis ekonomi, serta transformasi luas dalam kesadaran rakyat.³¹

Terdapat tiga elemen utama saling terkait yang mendorong taktik repertoar yakni kontentasi, identitas perlawanan dan intensitas perlawanan.

Konsep gerakan sosial mempersyaratkan adanya tujuan bersama. Dalam teori repertoar dikenal dengan adanya *claim*. *Claim* ini merupakan properti dari repertoar sekaligus merupakan tujuan bersama dari gerakan repertoar. Lebih lanjut Tilly menjelaskan adanya tiga macam *claim* yang berbeda dalam teori repertoar³²;

- a. *Identity; Claim* yang menginginkan adanya keterlibatan suatu pihak tertentu dalam sebagai pengakuan terhadap eksistensi mereka
- b. *Standing; Claim* yang menginginkan tempat atau posisi tertentu dalam rezim
- c. *Program; Claim* untuk menuntut sebuah program ataupun kebijakan

Tilly menerapkan tiga tema, yaitu: repertoar kompetitif, menyoroti klaim dan perebutan sumberdaya satu kelompok komunal sebagai perlawanan terhadap *claim* dari kelompok serupa lainnya; repertoar aksi reaktif, disisi lain, menunjuk ke aksi-aksi kelompok-kelompok komunal menentang upaya negara meraih control terhadap populasi sumber dayanya; terkahir adalah repertoar aksi kolektif proaktif. Ia mengacu ke *claim* ke kelompok atas kekuasaan dan hak-hak istimewa atau atas sumber daya yang sebelumnya tidak ada³³.

Aksi proaktif terus-menerus mencari kontrol atas struktur-struktur kekuasaan ketimbang mempertahankan yang ada, dan ia membutuhkan sebuah organisasi yang bertujuan khusus dalam tempatnya diantara kelompok-kelompok komunal tradisional. Aksi kolektif reaktif dengan demikian bersifat bertahan sedangkan yang proaktif bersifat menyerang. Bidikan aksi reaktif adalah mempertahankan dunia kehidupan tradisional dalam

²⁸ Wiktorowicz, *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, 2012, Jakarta: Democracy Project, hlm 229

²⁹ Ibid, hlm 229-230

³⁰ Ibid, hlm 230

³¹ Ibid, hlm 230

³² Siti Sulastri, *Dinamika Gerakan Sosial: Transformasi dari Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Hijra Hingga Boko Haram*, *Skripsi UGM*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015, hlm 7

³³ Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: Resist Book, 2010, hlm 139-140

ranah komunal. Aksi proaktif, disisi lain, menggunakan mobilisasi *offensive* untuk merebut pengakuan dan kekuasaan yang lebih besar³⁴.

Pembahasan

Laskar Hijau Sebagai Gerakan Sosial

1. Tantangan Kolektif

Sebagai gerakan yang terbentuk dilatar belakang oleh kerusakan lingkungan. A'ak Abdullah sebagai salah satu inisiator terbentuknya Laskar Hijau merasa prihatin dengan keadaan dan kondisi lingkungan yang rusak akibat dari gundulnya hutan Gunung Lemongan yang berdampak pada penurunan debit air pada ranu-ranu disekitarnya. Kondisi tersebut yang mendorong A'ak Abdullah untuk melakukan gerakan penyelamatan dengan menghijaukan kawasan ranu-ranu tersebut pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2008, A'ak Abdullah memperluas gerakannya dengan menanam pohon di sekitar lereng gunung lemongan. A'ak Abdullah menyakini bahwa Gunung Lemongan sebagai induk konservasi bagi ranu-ranu disekitarnya sehingga kondisi Gunung Lemongan sangat menentukan kelestarian ranu-ranu disekitarnya dan kesejahteraan masyarakat sekitar Gunung Lemongan.

A'ak Abdullah bersama masyarakat Klakah lainnya, bersepakat membentuk suatu tim kerja yang bertugas menanami Gunung Lemongan pada setiap hari minggu dan tim itu diberi nama "Laskar Hijau". Laskar Hijau sebagai gerakan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan bertekad untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memerangi para perusak lingkungan.

Dari cerita diatas, menyiratkan bahwa tantangan kolektif sehingga terbentuknya Laskar Hijau adalah kerusakan lingkungan, terutama yang terjadi di hutan Gunung Lemongan. Laskar Hijau dalam perjalanannya juga menghadapi tantangan berupa kerusakan lingkungan yang merupakan dampak dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Laskar Hijau merupakan sebuah gerakan kerelawanan, dimana ikatan yang memperkuat gerakan dari Laskar Hijau adalah kesadaran masing-masing individu yang terlibat. Pak Imam dan Sdr. Ilal Hakim sebagai narasumber dari penulis pun mengatakan bahwa mereka bergabung dengan Laskar Hijau hanya berdasarkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Dari cerita diatas, dapat disimpulkan bahwa Laskar Hijau merupakan suatu gerakan yang kolektivitas aksinya didasari oleh kesadaran individu-individu yang terlibat. Aksi kolektif yang tergabung dalam Laskar Hijau menyadari akan pentingnya kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sehingga hal yang menjadi tantangan kolektif bagi Laskar Hijau adalah kerusakan lingkungan. Sebagaimana latar belakang terbentuknya Laskar Hijau pun di sebabkan oleh rusaknya hutan Gunung Lemongan yang berdampak pada ranu-ranu disekitarnya.

Kesadaran masyarakat yang rendah untuk menjaga kelestarian lingkungan menjadi salah satu sebab dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Penebangan hutan lindung, pembakaran lahan dan penanaman pohon sengon menjadi salah satu yang diperjuangkan oleh

³⁴ *Ibid*, hlm 140

Laskar Hijau untuk dihentikan. Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, diakibatkan oleh kepentingan ekonomi dengan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan.

2. Tujuan Bersama

Keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan menjadi faktor pendorong individu-individu yang terlibat dalam aksi kolektif Laskar Hijau. Saat terbentuknya Laskar Hijau pada tahun 2008 yang dihadiri sekitar 300 orang dan bertempat di Gunung Lemongan, ketika itu, disepakati bahwa untuk menyelamatkan ranu-ranu sekitar Gunung Lemongan maka mereka harus menanam di Gunung Lemongan sebagai induk konservasi ranu-ranu tersebut secara rutin. Saat itu, deklarasi terbentuknya Laskar Hijau, mereka menyatakan sumpahnya untuk menanam di Gunung Lemongan pada setiap hari minggu.

Tidak seluruhnya 300 orang yang hadir ketika Laskar Hijau terbentuk bertahan dan tetap melakukan penghijauan di Gunung Lemongan seperti yang diungkap oleh A'ak Abdullah diatas. Walaupun demikian, perjalanan Laskar Hijau telah menginjak pada tahun kedelapan.

Individu-individu yang terlibat di dalam Laskar Hijau bukanlah para akademisi dan aktivis lingkungan. Namun, mereka yang terlibat dalam kolektivitas aksi Laskar Hijau adalah masyarakat biasa dan beberapa merupakan orang-orang yang memiliki masa lalu kelam dan orang-orang seperti itulah yang tetap bertahan di Laskar Hijau

Laskar Hijau menetapkan visi sebagai berikut *“memulihkan ekosistem Gunung Lemongan dalam bentuk laku penghijauan dengan konsep hutan setaman”*. Untuk mencapai visi tersebut Laskar Hijau menjalankan misi sebagai berikut:

1. Memulihkan Gunung Lemongan sebagai pilar ekosistem yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat;
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dengan tanpa merusak hutan;
3. Mempengaruhi masyarakat untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan khususnya Gunung Lemongan;
4. Menyelenggarakan pendidikan berbasis pelestarian lingkungan untuk masyarakat.

A'ak Abdullah mengungkapkan bahwa tujuan besar dari Laskar Hijau adalah menghijaukan Gunung Lemongan. Seperti yang sudah diceritakan diatas bahwa kondisi Gunung Lemongan sangat menentukan kelestarian ranu-ranu disekitarnya, dimana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada ranu-ranu tersebut.

Laskar Hijau juga menerapkan prinsip *“Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera”*. Sebagaimana diungkapkan oleh Ilal Hakim bahwa prinsip tersebut merupakan semangat dari individu yang terlibat dalam Laskar Hijau.

Dalam sebuah kolektivitas aksi, tujuan dan nilai-nilai bersama menjadi basis dalam sebuah tindakan-tindakan bersama. Saat penulis melakukan wawancara dengan beberapa relawan Laskar Hijau tersirat bahwa apa yang menjadi tujuan Laskar Hijau juga menjadi tujuan mereka dalam menjalani kehidupan. Seperti ungkapan Ilal Hakim, beliau bergabung dengan Laskar Hijau tanpa ada paksaan dari siapapun, melihat apa yang dilakukan oleh Laskar Hijau membuat Ilal Hakim tergugah untuk bergabung dengan Laskar Hijau. Dengan menanam, ungkap Ilal Hakim kita setidaknya sudah berbagi walaupun hanya berbagi

oksigen. Hal serupa juga dialami oleh Pak Imam, beliau mengatakan, bergabung dengan Laskar Hijau dan melakukan penanaman juga tergugah dari kesadarannya sendiri. Beliau mengungkapkan bahwa apa yang dikerjakannya bersama Laskar Hijau dilakukannya secara ikhlas, walaupun beliau tidak mendapatkan penghasilan dari apa yang beliau kerjakan. Beliau mengatakan bahwa semua itu hanyalah untuk kepentingan masyarakat banyak, apabila tanaman yang ditanam sudah ditumbuh dapat menjadi sumber air bagi ranu-ranu disekitar Gunung Lemongan.

3. Solidaritas Kolektif dan Identitas Kolektif

Permasalahan yang menjadi faktor Laskar Hijau bergerak adalah permasalahan yang terkait dengan kerusakan lingkungan. Kecintaan terhadap lingkungan menjadi faktor utama pemersatu dari setiap individu yang terlibat dalam Laskar Hijau. Ditambah budaya yang dibangun di dalam Laskar Hijau adalah budaya persaudaraan, menurut Ilal Hakim Laskar Hijau adalah organisasi yang unik karena tidak memiliki struktur kepengurusan. Namun, budaya itulah yang mempererat gerakan Laskar Hijau agar terus berjalan.

Ilal Hakim pun mengungkapkan bahwa gerakan Laskar Hijau bukanlah gerakan pencitraan. Atas dasar kepedulian terhadap lingkungan, terutama kelestarian lingkungan di hutan Gunung Lemongan. A'ak Abdullah bersama beberapa masyarakat Klakah lainnya bersepakat untuk membentuk sebuah kolektivitas aksi yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan di hutan Gunung Lemongan pada khususnya dan memerangi para perusak lingkungan pada umumnya.

Seperti yang sudah diceritakan diatas bahwa relawan yang terlibat dalam Laskar Hijau memutuskan untuk bergabung di dasari karena kesadaran yang timbul pada masing-masing individu.

Kerusakan lingkungan merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. Ketika lingkungan mengalami kerusakan akan memberikan dampak pada hilangnya sumber daya dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup di alam semesta.

Kolektivitas aksi Laskar Hijau membentuk suatu identitas kolektif berdasarkan atas kepedulian terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia menjadi faktor penggerak Laskar Hijau untuk melakukan aksi nyata. Aksi-aksi yang dilakukan oleh Laskar Hijau semata-mata untuk menyelamatkan lingkungan dan dengan itu masyarakat dapat menikmati kesejahteraan sebagai hasil dari lestarinya lingkungan. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa relawan Laskar Hijau sebagaimana sudah diceritakan diatas sebelumnya.

Kemudian untuk membangun solidaritas kolektif, Laskar Hijau membangun budaya persaudaraan yang kuat antara para relawan dengan membentuk budaya organisasi alami dan tanpa hirarki. Hal itulah yang menurut beberapa relawan menjadi faktor untuk mempererat dan menjaga agar gerakan yang dilakukan oleh Laskar Hijau tetap berjalan, seperti yang sudah diceritakan oleh Ilal Hakim dan Pak Imam diatas.

4. Memelihara Politik Perlawanan

Suatu aksi kolektif dapat berubah menjadi gerakan sosial apabila tujuan, tantangan dan solidaritas serta identitas kolektif mereka dapat dipertahankan. Untuk mempertahankan

tiga unsur penggerak tersebut dari Laskar Hijau tidak memiliki strategi khusus, seluruhnya dikembalikan kepada semangat masing-masing individu.

Sesuatu yang dapat mempertahankan semangat gerakan Laskar Hijau adalah dari budaya yang dibangun di dalam Laskar Hijau. Dimulai dari bentuk gerakan yang bersifat kerelawanan sampai dengan semangat persaudaraan yang tinggi dari masing-masing individunya. Untuk membangun rasa persaudaraan tersebut beberapa hal dilakukan oleh Laskar Hijau.

Semangat berbagi yang terbangun dalam iklim gerakan Laskar Hijau pun menjadi salah satu faktor untuk individu-individu di dalamnya untuk tetap terlibat dalam gerakan Laskar Hijau

Selain itu, semangat yang dibangun oleh Laskar Hijau juga terdapat dalam konsep yang diterapkannya, yaitu "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera". Semangat itulah yang tetap mempertahankan para relawan Laskar Hijau untuk tetap terlibat bersama Laskar Hijau.

Kemudian, beberapa hal yang menjadi faktor penguat dan memperkuat gerakan serta yang menjadi penguat tekad beberapa individu di dalam Laskar Hijau adalah ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

"Dan ialah yang membentangkan bumi, menancapkan di atasnya gunung-gunung, dan mengalirkan sungai-sungai, dan setiap jenis buah-buahan, dijadikan-Nya di dalamnya berpasang-pasangan. Ditutupkan-Nya malam kepada siang. Sungguh, dalam semua itu ada tanda-tanda (kekuasaan Tuhan) bagi kaum yang menggunakan pikiran. (Ar Ra'ad : 3)"

Kemudian Hadist Rasulullah yang berbunyi:

"Kami mencintai gunung uhud dan gunung uhud juga mencintai kami. (Al Hadist)"

A'ak Abdullah menceritakan bahwa Hadist tersebut yang menguatkan tekadnya untuk tetap melakukan penghijauan di Gunung Lemongan. Menurut beliau ketika melakukan penghijauan tersebut yang memaksanya untuk naik-turun gunung, mendapatkan cemoohan dari beberapa warga. Namun, berkat Hadist tersebutlah yang membuat A'ak Abdullah untuk tetap meneruskan gerkannya.

Selain itu, untuk membangun tekad dari seluruh relawan Laskar Hijau A'ak Abdullah memakai Hadist yang berbunyi:

"Tidak seorang muslim pun yang menanam pohon, yang kemudian buahnya dimakan oleh burung, manusia dan hewan, melainkan dia mendapatkan pahala sedekah. (Al Hadist)"

Dan terakhir adalah Hadist yang berbunyi:

"Apabila datang hari kiamat kepadamu, sedangkan di tanganmu terenggam benih pepohonan, maka tanamlah! (Muhammad SAW)"

Bentuk-bentuk Perlawanan Laskar Hijau Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

1. Membangun Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan faktor kunci dari perlawanan terhadap pertambangan pasir besi ini. Laskar Hijau ketika itu berusaha untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat untuk satu kata menolak tambang. Penyadaran masyarakat ini dilakukan bertujuan agar masyarakat memahami apa tambang itu dan persoalan-persoalan apa saja yang dapat ditimbulkan dari pertambangan. Untuk melakukan penyadaran terhadap masyarakat beberapa langkah yang dilakukan oleh Laskar Hijau.

a. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pertambangan. Laskar Hijau mengajak masyarakat memahami apa itu tambang, daya rusak lingkungan akibat pertambangan, serta persoalan-persoalan yang muncul akibat adanya pertambangan di desa mereka. Laskar Hijau tidak bekerja sendiri untuk mensosialisasikan bahaya pertambangan di desa Wotgalih, saat itu, Laskar Hijau mendatangkan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) untuk membantu memberikan pemahaman masyarakat desa Wotgalih tentang bahaya pertambangan. Selain mensosialisasikan bahaya pertambangan, Laskar Hijau juga memberikan contoh-contoh gerakan perlawanan masyarakat terhadap pertambangan di Indonesia.

b. Pengajian Rutin

Laskar Hijau mengadakan pengajian rutin pada tiap RT di Desa Wotgalih, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang bahaya pertambangan. Pengajian rutin dipilih sebagai media penyadaran karena sebagian besar masyarakat desa Wotgalih beragama Islam.

Pengajian rutin ini mengangkat tema-tema tentang lingkungan. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat desa Wotgalih memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan terutama lingkungan desa tempat tinggal mereka. Mengingat dampak dari pertambangan pada tahun 1997-2004 meninggalkan kerusakan lingkungan di pesisir pantai selatan dan lahan pertanian warga, selain itu, pesisir selatan Lumajang termasuk dalam zona rawan *tsunami*.

Dengan dipilihnya tema-tema tentang lingkungan, masyarakat desa Wotgalih diharapkan memahami arti penting lingkungan untuk kehidupan manusia, serta memahami kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pertambangan di desanya.

c. Pendekatan Tokoh Desa

Selain mengadakan sosialisasi dan pengajian rutin, pendekatan secara persuasif kepada tokoh desa juga dilakukan oleh Laskar Hijau. Hal ini dilakukan dengan melihat budaya masyarakat desa Wotgalih yang cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh tokoh desa – dalam hal ini adalah Kyai.

Dengan mendekati para Kyai desa Wotgalih, memberikan dukungan kepada Laskar Hijau untuk memobilisasi kekuatan dalam menolak pertambangan di desa Wotgalih.

d. Hasil

Usaha yang dilakukan oleh Laskar Hijau membuahkan hasil. Upaya menyadarkan masyarakat itu menghasilkan kekompakan warga Wotgalih untuk satu kata menolak tambang. Dari keseluruhan warga Wotgalih hanya sekitar 23 kepala keluarga yang berusaha untuk mendukung adanya tambang di Desa Wotgalih. Hal itu diungkapkan A'ak Abdullah sebagai berikut:

“dan Alhamdulillah, dari total warga di Wotgalih hanya 23 kepala keluarga yang masih pro tambang”³⁵

Laskar Hijau dan warga Wotgalih ketika itu bersepakat untuk memasang *sticker* dimasing-masing rumah yang bertuliskan “Keluarga Anti Tambang Pasir Besi” dan hasilnya adalah terdeteksinya 23 kepala keluarga yang ketika itu tidak mau rumahnya dipasang *sticker* tersebut.

Selain terbangunnya kesadaran masyarakat, Laskar Hijau dan masyarakat berhasil memetakan “siapa lawan” dan “siapa kawan” dalam gerakan perlawanan mereka terhadap pertambangan pasir besi di desa Wotgalih.

2. Dialog Dengan Pemerintah

Cara-cara persuasif dilakukan oleh Laskar Hijau dan warga Wotgalih untuk menuntut dicabutnya izin yang diberikan pemerintah Kabupaten Lumajang kepada PT Antam. A'ak Abdullah menceritakan:

“kemudian cara-cara persuasif ke pemerintah daerah kita lakukan juga. Ngajak dialog, diskusi dengan bupati pada waktu itu”³⁶

Pada saat itu, Laskar Hijau dengan Warga Wotgalih mendatangi dan berkirim surat penolakan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menuntut dan mempertanyakan persoalan pencabutan izin pertambangan PT Antam. Seperti yang terdokumentasi dalam Kliping Perjuangan Masyarakat Wotgalih Menolak Penambangan Pasir Besi:

“warga wotgalih mendatangi kantor DPRD Lumajang untuk melakukan audiensi penolakan pertambangan pasir besi PT Antam”³⁷

“belasan warga Wotgalih, mendatangi DPRD Lumajang untuk menyampaikan surat penolakan penambangan pasir besi yang akan dilakukan oleh PT Antam.”³⁸

“Puluhan warga desa Wotgalih ramai-ramai datang ke DPRD Lumajang untuk bertemu dengan wakil rakyat mereka. Pertemuan itu terkait penolakan sebagian besar warga desa Wotgalih, terhadap penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT Antam”³⁹

³⁵ Wawancara dengan A'ak Abdullah, 1 Juli 2016

³⁶ Ibid, 1 Juli 2016

³⁷ Kliping Perjuangan Masyarakat Wotgalih

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

Perlawanan terhadap pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih dalam bentuk dialog dengan pemerintah dilakukan oleh Laskar Hijau bersama dengan masyarakat Wotgalih beberapa kali. Namun, upaya untuk dialog dengan pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Lumajang tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan oleh Laskar Hijau dan masyarakat.

Upaya dialog yang dilakukan, hanya sampai pada bertemu dengan ketua DPRD Kabupaten Lumajang dengan tindak lanjut akan mempertimbangkan aspirasi dari Laskar Hijau dan masyarakat Wotgalih tersebut. Seperti yang terdokumentasi dalam klipring:

“Walau sempat menunggu hampir setengah jam. Puluhan warga yang merupakan perwakilan warga ini, akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD Lumajang H. Agus Wicaksono”⁴⁰

“Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang menyatakan menerima aspirasi masyarakat tersebut, dan akan mempertimbangkan usulan warga untuk disampaikan kepada pemerintah.”⁴¹

Walaupun demikian masyarakat tetap menyampaikan aspirasinya terkait dengan penolakan pertambangan di desanya. Sampai dengan tahun berikutnya Laskar Hijau dan masyarakat menganggap bahwa aspirasinya yang disampaikan kepada DPRD tidak membuahkan hasil sampai pada tahun berikutnya tersebar isu bahwa PT Antam akan segera menurunkan alat beratnya dilokasi pertambangan.

Menyikapi hal tersebut, Laskar Hijau dan masyarakat Wotgalih kembali mendatangi kantor DPRD untuk mempertanyakan kejelasan terkait dengan persoalan pencabutan izin PT Antam.

“Karena tak kunjung ada keputusan soal ijin Aneka Tambang untuk eksplorasi pasir besi. 15 perwakilan warga Wotgalih hari ini datang ke DPRD Lumajang.”⁴²

“Mereka datang ke DPRD Lumajang untuk mempertanyakan kesungguhan DPRD Lumajang dalam melakukan pembelaan atas permintaan masyarakat Wotgalih agar Pemkab mencabut ijin bagi PT Aneka Tambang”⁴³

Selain mendatangi kantor DPRD Lumajang, Laskar Hijau dan masyarakat Wotgalih juga kerap mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang. Kedatangan mereka dilakukan rutin setiap hari senin untuk memastikan bahwa Pemkab Lumajang bersungguh-sungguh untuk mencabut izin pertambangan oleh PT Antam⁴⁴.

Namun, upaya persuasif yang dilakukan sama sekali tidak menghasilkan apapun. Hal itu ditingkalkan oleh A'ak Abdullah:

“cara-cara persuasif ke pemerintah daerah kita lakukan juga, ngajak dialog, diskusi dengan bupati waktu itu. Kemudian cara itu tidak menghasilkan apa-apa.”⁴⁵

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Wawancara dengan A'ak Abdullah, 1 Juli 2016

Hal yang sama juga diungkapkan oleh AM. Ridwan:

“Masyarakat melakukan penolakan secara baik-baik awalnya. Kita melakukan penolakan secara lisan dan tulisan ke pemerintah. Tapi semua itu gak direspon sama sekali sama pemerintah, pemerintah gak gubris penolakan kita”.⁴⁶

Untuk memuluskan jalan mereka agar bisa kembali lagi beroperasi di Desa Wotgalih pihak PT Antam meminta warga untuk menandatangani surat dukungan pertambangan dengan mengancam dan memaksa warga Wotgalih.

“Sekarang ini didesa kami ada aksi pengumpulan tanda tangan warga untuk mendukung usaha penambangan yang disertai dengan intimidasi”⁴⁷

Intimidasi yang dilakukan oleh PT Antam tersebut dilakukan oleh salah satu anggota BPD yang memaksa warga untuk menyetujui rencana penambangan pasir kembali oleh PT Aneka Tambang. Ketika itu orang-orang PT Antam menakut-nakuti warga untuk setuju dalam pertambangan pasir besi. Apabila warga menolak akan dikenai pidana 1 tahun dan didenda 100 juta.⁴⁸

Dari upaya pihak PT Antam tersebut, warga Wotgalih merespon dengan mendatangi kepala desa. Warga Wotgalih meminta kepala desa untuk menindak tegas adanya intimidasi terhadap warga yang menolak keberadaan PT Antam.

“Lebih kurang seratus warga Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang menolak beroperasinya kembali penambangan pasir besi PT Aneka Tambang, (5/7) menyerbu balai desa setempat”⁴⁹

“Warga mendesak aparat untuk menindak tegas menyikapi intimidasi segolongan masyarakat terhadap penolakan PT Aneka Tambang yang kini tengah gencar disuarakan oleh warga Desa Wotgalih”⁵⁰

Hasil dari desakan warga terhadap kepala desa tersebut adalah akan dipertemukannya pihak PT Antam dengan warga Wotgalih untuk meminta penjelasan terkait intimidasi tersebut. Warga Wotgalih meminta untuk dipertemukan dengan pihak pro tambang dan pihak PT Antam untuk menegaskan penolakan mereka terhadap PT Aneka Tambang.⁵¹ Namun, pertemuan tersebut tetap tidak membuahkan titik temu bahkan PT Antam sempat masuk kedalam wilayah yang akan ditambang untuk pengambilan sample pasir besi.

2. Demonstrasi Massa

Setelah perlawanan Laskar Hijau dan warga Wotgalih dalam bentuk audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak membuahkan hasil. Bentuk perlawanan dominan yang dipilih selanjutnya adalah demonstrasi massa. Konsentrasi masa ketika itu, terpusat pada kantor-kantor pemerintahan dan pengadilan negeri kabupaten Lumajang.

⁴⁶ Wawancara dengan Ilal Hakim, 29 Juni 2016

⁴⁷ Kliping Perjuangan Masyarakat Wotgalih

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

a. Demonstrasi Massa I

Demonstrasi masa ini berlangsung sejak adanya kriminalisasi terhadap warga anti-tambang Wotgalih oleh pihak pro-tambang. Kriminalisasi terhadap warga ini dilatarbelakangi karena adanya pro-kontra pertambangan di Desa mereka. Kelompok anti-tambang ketika itu yang gencar menyuarakan penolakannya terhadap rencana pertambangan kembali oleh PT Antam di desanya di dakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada salah satu orang yang termasuk kedalam kelompok pro-tambang.

“Dilaporkan telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan pengeroyokan terhadap warga lainnya, empat orang warga Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Jumat (17/9) ditangkap aparat polres Lumajang.”⁵²

“Mereka sejak awal menolak rencana perpanjangan ijin tambang pasir besi PT Antam (Aneka Tambang). Keempat warga ini dicituk aparat Polres Lumajang di rumahnya masing-masing, kemarin malam. Mereka adalah Mukin (49), Fendik (39), H Artawi (51) dan Samawi (50).”⁵³

“Pihak pelapor dalam hal ini adalah seorang warga yang pro dengan rencana pertambangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut bernama M. Dayat (37).”⁵⁴

AM. Ridwan menceritakan bahwa penangkapan warga anti-tambang tersebut merupakan tindakan kriminalisasi. AM Ridwan ketika diwawancarai mengatakan sebagai berikut:

“Kemudian penolakan warga saat itu di intimidasi, sampai kita dikriminalisasi 4 orang. Mereka dikenakan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Jadi warga ditakut-takuti oleh aparat penegak hukum yang ada dilumajang.”⁵⁵

Kejadian itu berawal ketika pihak PT Antam mendatangi kawasan yang akan dijadikan areal pertambangan untuk mengambil *sample* pasir besi. Perwakilan PT Antam yang melakukan tugas tersebut sebanyak 8 orang didampingi oleh M. Dayat. Saat itu keempat warga anti-tambang itu berupaya untuk mengusir pihak perwakilan PT Antam tersebut. Perwakilan PT Antam itu berhasil lolos dari kepungan warga, namun M. Dayat yang tertinggal dilokasi menjadi sasaran warga.⁵⁶

Penangkapan empat warga anti-tambang tersebut berujung pada meja persidangan. Dalam proses persidangan inilah demonstrasi masa anti-tambang mengkonsentrasikan dirinya di pengadilan tinggi Lumajang untuk mengawal proses persidangan tersebut. Demonstrasi massa tersebut untuk mendukung keempat warga yang menurut mereka telah dikriminalisasi, dan juga untuk menegaskan keinginan mereka untuk tetap menolak pertambangan pasir besi di desanya walaupun harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Masa persidangan terkait dengan keempat warga anti-tambang ini berlangsung selama hampir satu bulan. Persidangan ini cukup menyita perhatian sejumlah kalangan, terutama dari

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Wawancara dengan AM Ridwan, 29 Juni 2016

⁵⁶ Kliping Perjuangan Masyarakat Wotgalih

aparatus kepolisian, karena selalu dihadiri ratusan pengunjung pendukung terdakwa. Hal ini dikarenakan, munculnya kasus ini masih berkaitan dengan penolakan warga Wotgalih terhadap rencana penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT Antam.

Pada tanggal 16 februari 2011, sedikitnya 600 lebih warga mendatangi pengadilan negeri kabupaten Lumajang. Di halaman gedung pengadilan negeri, massa sempat menggelar aksi pelepasan merpati sebagai simbol agar majelis hakim yang mempersidangkan keempat warganya, memutuskan perkara dengan adil.⁵⁷ Selanjutnya massa duduk dengan tertib di halaman gedung pengadilan negeri dan sebagian tokoh masyarakat lainnya memasuki ruang persidangan. Mereka mendengarkan dengan tertib putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.⁵⁸

Persidangan yang dibarengi dengan demonstrasi massa tersebut merupakan persidangan putusan terkait dengan empat warga Wotgalih yang diduga melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada M. Dayat.

Persidangan ketika itu, memutuskan bahwa keempat warga Wotgalih tersebut terbukti bersalah dan majelis hakim memutuskan penahanan kepada keempat warga tersebut dengan penahanan penjara selama 5 bulan 2 hari. Namun, pada saat persidangan putusan itu, vonis hukuman dipotong dengan masa tahanan yang sudah dijalani dimana masa penahanan tersebut sama dengan vonis dari majelis hakim. Sehingga pasca putusan tersebut, keempat warga anti-tambang itu dinyatakan bebas dari hukuman.

Walaupun kasus tersebut menyeret empat warga anti-tambang pada meja persidangan. Namun, keempat warga tersebut dianggap sebagai pahlawan desa dalam penyelamatan lingkungan kawasan pantai selatan.

“Mereka adalah pahlawan desa, karena dihukum karena menyelamatkan desa dari penambangan yang bisa merusak ekosistem pantai”⁵⁹

“Majelis hakim memvonis bersalah terhadap tindakan pidana perbuatan tidak menyenangkan pada Dayat dengan kurungan 5 bulan 2 hari. Walau begitu, masyarakat Wotgalih menganggap warganya tidak bersalah dalam mempertahankan lingkungannya dari kerusakan pasir besi oleh PT Antam”⁶⁰

“Masyarakat menganggap 4 warga yang telah bebas dari penjara, sebagai tokoh dan figur yang berani dalam penolakan pasir besi oleh PT Antam.”⁶¹

b. Demonstrasi Massa II

Demonstrasi massa ini terjadi setelah pengeroyokan terhadap salah satu warga anti-tambang oleh kelompok pro-tambang, penganiayaan terhadap warga anti-tambang ini berselang tidak jauh dari selesainya proses persidangan terkait empat warga anti-tambang diatas. AM. Ridwan menceritakan ketika itu:

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

“empat orang ini menjalani hukuman selama 5 bulan 2 hari. Selang beberapa hari, warga pro akhirnya menyerang warga yang menolak tambang. Mereka dikeroyok”⁶²

“juga termasuk saya sendiri sebagai saksi mata, kita tidak melawan dengan kekerasan. Tapi mereka menggunakan celurit bahkan di depan aparat mereka berani mengatakan “*siapa yang berani, saya disini kebal huku, banyak yang melindungi*. Itu orang-orang pro dulu. “*siapapun yang melawan penambangan ini, musuhnya negara*” itu bilanganya orang-orang pro saat itu”⁶³

Menurut beberapa artikel dalam Kliping Masyarakat Wotgalih Menolak Penambangan Pasir Besi. Penganiayaan tersebut juga dipicu oleh adanya pro-kontra tambang di beberapa kelompok masyarakat. Saat itu, salah satu warga anti-tambang mengalami penganiayaan disertai pembacokan oleh enam orang tidak dikenal di depan balai desa.

Tidak lama kemudian, pada tanggal 16 Mei 2011 aparat kepolisian Lumajang menangkap satu orang yang diduga pelaku penganiayaan tersebut. Setelah dilakukan penangkapan oleh kepolisian, warga Wotgalih sempat mendatangi dan mengepung rumah-rumah warga pro-tambang. Dari tindakan warga tersebut menghasilkan sebelas orang tersangka lainnya yang diserahkan pada polisi.

Demonstrasi massa pun pernah terkonsentrasi di areal kantor Kepolisian Sektor Yosowilangun. Demonstrasi masa itu menyusul dengan ditetapkan tiga dari sebelas orang yang diduga melakukan penganiayaan terhadap warga anti-tambang.

“kedatangan warga ke Mapolsek setempat, dikarenakan beberapa pelaku penganiayaan tidak ditetapkan sebagai tersangka dan dilepas oleh polisi”⁶⁴

“kemarin, ratusan warga kontra PT Antam *nglurug* Mapolsek Yosowilangun. Aksi masa tersebut tersulut kabar hanya ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib pasca penganiayaan dan pembacokan terhadap Sahid, warga kontra Antam. Sedangkan sisanya sebanyak delapan orang yang sempat diamankan ternyata dilepas oleh pihak kepolisian”⁶⁵

Kasus penganiayaan ini juga masuk dalam tahap persidangan di pengadilan negeri Lumajang. Pada saat proses persidangan kasus ini, demonstrasi massa pun kembali terkonsentrasi di gedung pengadilan negeri kabupaten Lumajang. Alasan massa mengkonsentrasikan dirinya kembali di gedung pengadilan negeri adalah untuk mengawal proses persidangan tersebut dan memang karena kasus tersebut masih terkait dengan pro-kontra pertambangan pasir besi di desa Wotgalih.

Pada tanggal 7 September 2011 warga yang tergabung dalam kelompok anti-tambang mendatangi pengadilan negeri kabupaten Lumajang untuk mengawal sidang kasus penganiayaan terhadap warga anti-tambang. Kemudian pada tanggal 16 September, warga anti-tambang kembali menghadiri sidang lanjutan kasus tersebut. Warga anti-tambang menuntut majelis hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap terdakwa.

⁶² Wawancara dengan AM. Ridwan, 29 Juni 2016

⁶³ Ibid, 29 Juni 2016

⁶⁴ Kliping Perjuangan Masyarakat Wotgalih

⁶⁵ Ibid

“rombongan ratusan warga datang dengan mengendarai puluhan mobil dan ratusan sepeda motor yang beriring-iringan sepanjang jalan. Sesampainya di halaman PN Lumajang sekitar pukul 11.00 siang, warga langsung memadati PN Lumajang. Mereka kebanyakan membawa spanduk yang dibentangkan di halaman PN. Antara lain berbunyi “*Hukum musuh rakyat seberat-beratnya*” dan “*rakyat butuh keadilan bukan kepastian hukum yang semu*”⁶⁶

Selain spanduk yang berbunyikan tersebut diatas, massa pun membawa spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap pertambangan pasir besi di desanya.

“tak sedikit poster berisi penolakan atas eksploitasi pertambangan pasir besi di pesisir Desa Wotgalih yang perizinannya dikantongi PT Antam.”⁶⁷

Selain poster yang berbunyikan nada-nada menuntut keadilan hakim dan penolakan terhadap tambang. Massa aksi pun kerap melakukan ritual *istigosah* bersama. Ritual tersebut dilakukan bertujuan agar para terdakwa dihukum seberat-beratnya. Kemudian, peralatan aksi massa pun sempat menggunakan keranda mayat dan melaksanakan ritual *tahlil* di halaman PN Lumajang. Hal tersebut digunakan sebagai bentuk protes terhadap aparat penegak hukum yang dianggap memberikan hukuman terlalu kecil.

c. Demonstrasi Masa III

Demonstrasi massa untuk mendesak pencabutan izin usaha pertambangan kerap terkonsentrasi di gedung DPRD Kabupaten Lumajang. Pada tanggal 28 Februari demonstrasi massa mendatangi gedung DPRD Kabupaten Lumajang untuk menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Demonstrasi tersebut berbarengan dengan sidang paripurna anggota DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Pada aksi demonstrasi tersebut, masa kerap meneriakan *yel-yel* bahwa “Pemkab Lumajang dan DPRD telah mengkhianati hati rakyat karena izin Antam tidak dicabut” dan juga “Dulu mereka minta dukungan. Tapi sekarang rakyat ditindas”.⁶⁸ Demonstrasi massa tersebut mendapatkan respon untuk dilakukannya negosiasi antara massa aksi dengan pihak pemerintahan. Tetapi, dari negosiasi tersebut tidak menghasilkan titik temu sama sekali.

Dari hasil negosiasi yang tidak mencapai kesepakatan apa-apa, massa aksi ketika itu tidak mengizinkan kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lumajang untuk pulang. Massa aksi melakukan pemblokiran pintu gerbang gedung DPRD Lumajang sebagai bentuk kekecewaan massa terkait dengan hasil negosiasi tersebut. Akibat dari pemblokiran jalan pulang tersebut para jajaran pemerintahan termasuk Wakil Bupati Lumajang dan anggota DPRD tertahan selama enam jam.

Perlawanan dalam bentuk demonstrasi massa ini berlanjut ketika pemerintah Kabupaten Lumajang kembali menerbitkan Izin Usaha Pertambangan untuk PT IMMS. Demonstrasi massa ini dilakukan untuk menggagalkan acara sosialisasi AMDAL yang dilakukan oleh PT IMMS.

“ratusan warga anti tambang asal pesisir selatan Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kamis (10/05/2012) beramai-ramai mendatangi Hall Amanda di Jl.

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid

Panjaitan, Kecamatan Kota Lumajang. Kedatangan warga, baik pria maupun wanita yang berjumlah sekitar 500 orang lebih ini untuk menggagalkan rencana studi AMDAL dan konsultasi public atas rencana pertambangan pasir besi di pesisir desanya oleh PT IMMS.”⁶⁹

Pada demonstrasi aksi ini, massa aksi kembali menegaskan bahwa penolakan terhadap pertambangan di Desa Wotgalih merupakan harga mati. Dalam aksinya massa aksi kerap meneriakkan *yel-yel* “*kami menolak tambang. Bagi, kami tambang dipesisir desa kami, harga mati untuk tidak dilakukan*”.⁷⁰

Penanaman

1. Penghijauan Wilayah Pesisir

Bentuk perlawanan Laskar Hijau dan juga warga anti-tambang Wotgalih juga memilih bentuk perlawanan penghijauan. Bentuk perlawanan ini dipilih sebagai bentuk perlawanan ditujukan untuk mengembalikan ekosistem lingkungan kawasan pesisir selatan Lumajang. A'ak Abdullah mengungkapkan:

“yang pertama karena memang real sejak beberapa gump pasir itu hilang, maka sering terjadi rob di beberapa titik. Nah, oleh karena itu di beberapa titik itu dilakukan penghijauan.”⁷¹

Penghijauan ini juga merupakan bentuk aksi damai yang dilakukan untuk menolak pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih. Aksi penghijauan tersebut melibatkan 2000 warga Desa Wotgalih.

“Aksi damai yang dilakukan sekitar 2 ribu warga dengan menanam bibit pohon mangrove di rawa dan sungai di pinggir pantai.”⁷²

Aksi penghijauan itu juga merupakan bentuk kekecewaan terhadap PT Antam yang telah menimbulkan banyak kerusakan di kawasan pesisir selatan Lumajang dan juga sebagai bentuk kecintaan warga terhadap lingkungan.

“aksi warga ini bentuk ketidakpuasan pada PT Antam yang tidak pernah melakukan penghijauan di lokasi pertambangan. Aksi penanaman bibit mangrove, sebagai bentuk kecintaan warga Wotgalih terhadap lingkungan.”⁷³

Aksi tersebut pun bertujuan untuk menegaskan bahwa penolakan warga terhadap pertambangan di Desa Wotgalih masih terus berlanjut.⁷⁴ AM. Ridwan Mengatakan bahwa kegiatan penghijauan ini dilakukan setiap minggu sekali yang bertujuan untuk menjadikan pesisir selatan Lumajang sebagai zona hijau. AM. Ridwan mengungkapkan:

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Wawancara dengan A'ak Abdullah, 28 Juni 2016

⁷² Kliping Perjuangan Masyarakat Wotgalih

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid

“Dipesisir selatan, hampir seminggu sekali kami melakukan penghijauan. Karena, biar tidak abrasi pantainya. Kita melakukan penghijauan dipesisir selatan. Selain itu juga, memang wilayah pesisir selatan itu harus menjadi zona hijau”.⁷⁵

Menurut AM. Ridwan penting melakukan penghijauan di wilayah pesisir selatan karena kelestarian pesisir selatan akan menjadi penghadang bagi gelombang tsunami yang dapat menyelamatkan warga dari bencana tsunami tersebut.

2. Pertanian Semangka

Selain penghijauan, bentuk perlawanan terhadap tambang juga melalui pertanian. Laskar Hijau dan warga anti-tambang Wotgalih ingin membuktikan bahwa pertanian lebih mensejahterakan masyarakat daripada pertambangan. AM. Ridwan menceritakan:

“Terakhir perlawanan kami juga ada di pertanian. Kita ingin membuktikan bahwa bertani itu lebih mensejahterakan daripada tambang.”⁷⁶

A’ak Abdullah juga menceritakan hal yang sama:

“Masyarakat juga memberikan contoh bahwa bertani semangka jauh lebih menguntungkan daripada tambang. Jadi lahan lahan yang dulunya bekas-bekas tambang itu sama penduduk ditanami semangka dan dilakukan penghijauan dikawasan pesisirnya.”⁷⁷

“pertanian itu lebih membuktikan bahwa memang itu lebih menjanjikan dan lebih mensejahterakan kepada masyarakat daripada tambang. Itu bentuk aksi nyata saja, biar semua orang tau bahwa Wotgalih itu jauh lebih sejahtera kalo dikelola sebagai lahan pertanian daripada dikelola oleh pertambangan”⁷⁸

Pak Busianto sebagai salah satu petani yang juga ikut menolak pertambangan di desanya menyatakan bahwa mayoritas penduduk Wotgalih merupakan petani dan mereka menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian tersebut. Pak Busianto melanjutkan bahwa saat ini, beliau memilih untuk menanam semangka dan itu hampir sebagian besar warga Wotgalih juga menanam semangka.

Penghasilan dari bertani semangka itu berdasarkan yang sudah dirasakan oleh Pak Busianto sangat menguntungkan. Beliau menjelaskan bahwa bertani semangka penghasilan yang didapatkan dalam sekali panen semangka adalah 35 juta rupiah. Untuk bertani semangka dalam waktu satu tahun dapat menghasilkan panen semangka selama 4 kali. Menurut cerita dari Pak Busianto, sebagai salah satu petani semangka di Desa Wotgalih penghasilan satu tahun dari bertani semangka bisa mencapai 170 juta/tahun.

Kesimpulan

Penelitian ini menarasikan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Laskar Hijau dalam melakukan perlawanan terhadap pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Dalam penelitian ini, penulis memulai dengan

⁷⁵ Wawancara dengan AM. Ridwan, 29 Juni 2016

⁷⁶ Ibid, 29 Juni 2016

⁷⁷ Wawancara dengan A’ak Abdullah, 28 Juni 2016

⁷⁸ Ibid, 28 Juni 2016

mengidentifikasi terlebih dahulu kolektivitas aksi yang terorganisasikan dalam Laskar Hijau merupakan suatu Gerakan Sosial. Kemudian, penulis melanjutkan dengan menceritakan bentuk-bentuk perlawanan yang digunakan oleh Laskar Hijau terhadap pertambangan pasir besi di Desa Wotgalih.

Dalam mengidentifikasi Laskar Hijau sebagai Gerakan Sosial, penulis menggunakan beberapa indikator yaitu: *Tantangan Kolektif*; *Tujuan Bersama*; *Solidaritas dan Identitas Kolektif*; serta *Memelihara Politik Perlawanan*.

Dalam perkembangannya, tidak semua aksi-aksi kolektif dapat dikatakan sebagai gerakan sosial. Empat indikator yang penulis gunakan merupakan property dasar bagi suatu aksi kolektif dapat dikatakan sebagai suatu Gerakan Sosial. *Tantangan Kolektif* bagi Laskar Hijau adalah kerusakan lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup manusia; *Tujuan Bersama* Laskar Hijau adalah menghijaukan Gunung Lemongan; *Solidaritas dan Identitas Kolektif* adalah kecintaan terhadap lingkungan; terakhir yang menjadi faktor utama dari *Memelihara Politik Perlawanan* adalah budaya yang dibangun oleh Laskar Hijau sebagai organisasi bersifat kerelawanan dan persaudaraan yang kuat dari masing-masing individu. Selain itu, “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera” menjadi semangat bagi individu-individu dalam Laskar Hijau. Ayat-ayat Al-Qur’an dan beberapa hadist diatas juga merupakan salah satu faktor memperkuat agar terus dapat mempertahankan gerakan bagi Laskar Hijau.

Charles Tilly, yang mempelopori konsep repertoar perlawanan, menegaskan bahwa tanggapan rival perlawanan terhadap inisiatif dari para penentang harus dimasukkan dalam komponen integral dalam repertoar perlawanan. Bentuk perlawanan Laskar Hijau mengalami perubahan bentuk dalam kurun waktu tertentu. Kondisi-kondisi yang menyebabkan Laskar Hijau melakukan perubahan bentuk perlawanan karena tanggapan dari pihak lawan dan menganggap bahwa bentuk perlawanan tersebut belum efektif untuk pencapaian tujuan bersama.

Hubbul Wathan Minal Iman menjadi pemicu semangat dan penggerak untuk terus melakukan perlawanan terhadap tambang. Tradisi masyarakat tani yang selalu mensyukuri apapun dan berapapun yang dihasilkan oleh bumi juga menjadi faktor penggerak bagi Laskar Hijau dan warga anti-tambang. Semangat dan semboyan pejuang terdahulu juga menjadi sangat efektif untuk mempertahankan gerakan perlawanan terhadap tambang tersebut. Simbol-simbol Islam seperti *istigosah* menjadi juga menjadi simbol perlawanan bagi Laskar Hijau dan warga anti-tambang bagi mempertahankan perlawanannya dalam suasana damai dan itupun yang memberikan kekuatan spiritual bagi mereka dalam melakukan perlawanan.

Perlawanan yang dilakukan oleh Laskar Hijau dan warga anti-tambang dalam melakukan penolakan terhadap pertambangan dimulai dari tahun 2010-2012. Namun, sampai saat ini perlawanan tetap dilakukan dalam bentuk penghijauan dan pertanian sebagai aksi damai. Dari beberapa bentuk yang dipilih, intensitas perlawanan dalam bentuk demonstrasi massa memiliki intensitas tertinggi dan melibatkan mobilisasi massa yang massif. Setiap kali persidangan massa selalu mengkonsentrasikan dirinya di depan gedung PN Kabupaten Lumajang.

Dalam gerakan perlawanan Laskar Hijau terhadap pertambangan melibatkan dua unsur klaim dalam repertoar, klaim identitas dan klaim program. Keterlibatan petani dalam agenda-agenda kesejahteraan menjadi salah satu klaim yang terdapat dalam gerakan perlawanan ini. Ketika pertambangan masuk di Desa Wotgalih pada tahun 1997 masyarakat menganggap bahwa kehadiran mereka sama sekali tidak memberikan kesejahteraan. Justru

kerusakan lingkungan lah yang di tinggalkan oleh pertambangan di Desa mereka. Klaim program yang terdapat dalam gerakan perlawanan tambang ini adalah adanya tuntutan untuk mencabut kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang yang memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada PT Antam. Bentuk-bentuk perlawanan yang dipilih adalah merupakan bentuk perlawanan yang menuntut untuk dicabutnya Izin Usaha Pertambangan tersebut.

Daftar Pustaka

- Andyana, R. (2014). *Peranan Komunitas Taring Padi dalam Mengkritik Kebijakan Penambangan Pasir Besi di Kulonprogo*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Djaelani, A. R. (2014). *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Retrieved Februari 14, 2016, from eJournal iVET: <http://www.e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article/download/55/64>
- Dwicipta. (2015). *#RebangMelawan: Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng*. Yogyakarta: Literasi Press.
- Hasanudin. (2011). Dinamika dan Pengerucutan Teori Gerakan Sosial. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nahkoda*, 60-73.
- Hidayat, R. A. (2007). Gerakan Sosial Sebagai Agen Perubahan Sosial. *Jurnal Forum Ilmiah Indonusa*, 15-22.
- Huzaimah, S. (2015). *Gerakan Laskar Hijau Dalam Upaya Pelestarian Hutan Gunung Lemongan Klakah Lumajang*. Jember: Universitas Jember.
- Kamaruddin, S. A. (2012). Pemberontakan Petani Unra 1943. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, 19-35.
- Kuntjojo. (2009). *Metodologi Penelitian*. Retrieved Januari 6, 2016, from <https://ebekunt.files.wordpress.com/2009/04/metodologi-penelitian.pdf>
- Lofland, J. (2003). *Protes*. Yogyakarta88: Insist.
- Ma'rifah, S. R. (2014, April 21). *Konflik Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2011*. Retrieved Februari 14, 2016, from Universitas Jember Digital Repository: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57151>
- Mohammad, Y. (2015, Oktober 6). *Jejak IMMS, Perusahaan Tambang Pasir Lumajang*. Retrieved Desember 23, 2015, from Beritagar.id: <https://beritagar.id/artikel/berita/jejak-imms-perusahaan-tambang-pasir-lumajang>
- Naya, I. A. (2014). *Protes Masyarakat Terhadap Pembangunan Bandara Oleh PT Angkasa Pura 1 2014*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Purwanto, H. (2015, Oktober 1). *Sepak Terjang Perjuangan Salim Kancil Melawan Penambangan Liar*. Retrieved Desember 24, 2015, from Rappler: <http://www.rappler.com/indonesia/107755-sepak-terjang-salim-kancil-dibunuh-lumajang>
- Rahayu, H. (2015, November 5). *Pesisir Lumajang Rusak Akibat Tambang Liar*. Retrieved Desember 23, 2015, from Berita Benar: <http://www.benarnews.org/indonesian/berita/tambang-pasir-11052015122300.html>
- Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Situmorang, A. W. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharko. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1-34.
- Sulastri, S. (2015). *Dinamika Gerakan Sosial: Transformasi dari Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Hijra Hingga Boko Haram*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Tilly, C. (1978). *From Mobilization to Revolution*. New York: Random House.

- Tilly, C. (2005). *Popular Contention in Great Britain 1758-1834*. Boulder: Paradigm Publisher.
- Tilly, C. (2006). *Regimes and Repertoires*. Chicago: The University Of Chicago.
- Wiguna, I. P. (2015). Implikasi Gerakan People's Alliance For Democracy (PAD) Terhadap Kebijakan Luar Negeri Thailand Terkait Hubungan Bilateral Thailand-Kamboja Tahun 2008-2011. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1-14.
- Wiktorowicz, Q. (2012). *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial*. Jakarta: Democracy Project.